

Sekilas:

Program SKALA di Kalimantan Utara 2024-2025

Perkenalan

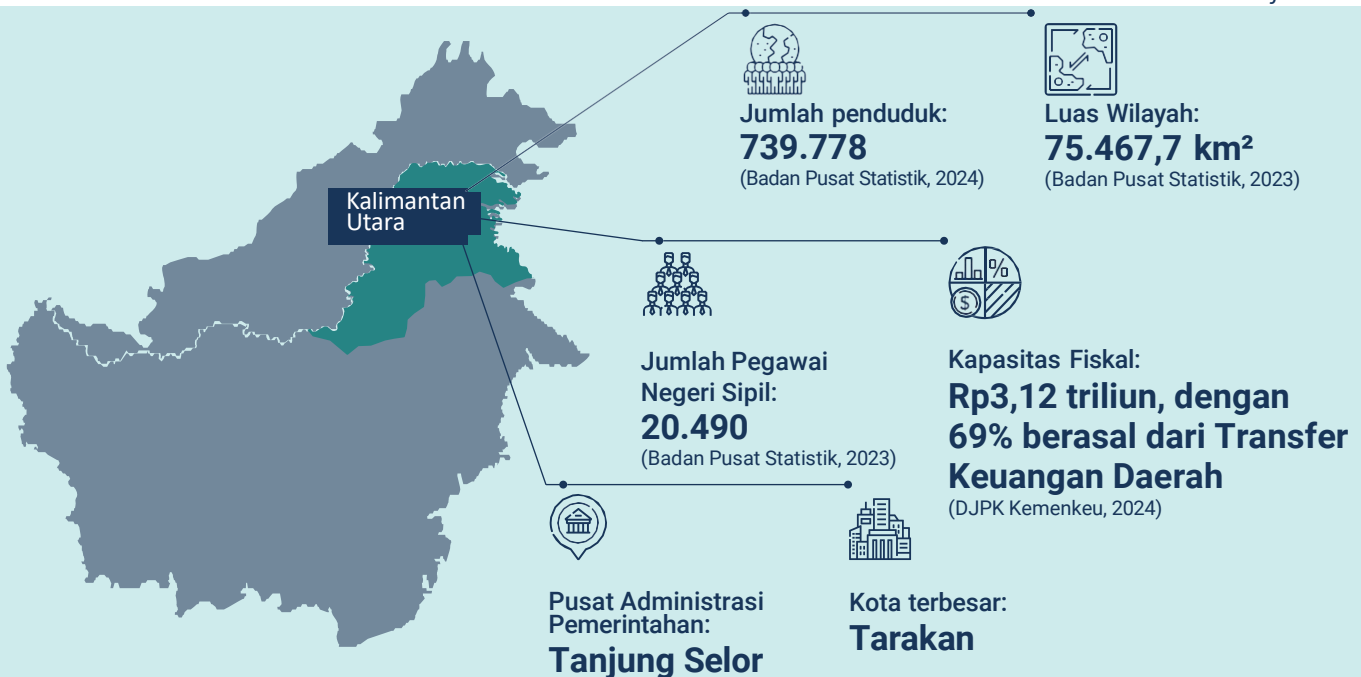
Kalimantan Utara (Kaltara) adalah salah satu provinsi termuda di Indonesia, yang resmi dibentuk pada 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Termasuk kategori salah satu wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Kaltara terletak di bagian utara Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dan memiliki posisi strategis di jalur laut Asia-Pasifik. Posisi geografis yang strategis ini menawarkan potensi yang besar untuk dikembangkan.

Provinsi Kaltara secara administratif memiliki 4 kabupaten (Bulungan, Nunukan, Tana Tidung, dan Malinau) dan 1 kotamadya (Tarakan), sementara ibu kotanya terletak di Tanjung Selor.

Mengingat wilayahnya yang luas dan penduduk yang tersebar di wilayah-wilayah terpencil, pemerintah provinsi terus berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas serta memperkuat pelayanan publik khususnya layanan dasar dan tata kelola pemerintahan agar lebih efisien.

SKALA¹ bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk memperkuat partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan, penyediaan dan penggunaan data, kapasitas fiskal daerah, dan kualitas belanja publik. Kantor SKALA di Kaltara mulai beroperasi pada bulan Oktober 2023.

Gambar 1. Data Administratif Utama



1. Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia yang bertujuan mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

Gambar 2.
Data Sosioekonomi Utama



**Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB):**

Rp201,75 Juta

(Badan Pusat Statistik, 2023)



**Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT):**

4,01%

(Badan Pusat Statistik, 2024)



Tingkat Kemiskinan:

6,32%

(Badan Pusat Statistik, 2024)



Penduduk Penyandang Disabilitas:

Ringan : 36.558

Berat : 9.889

(Regsosek-SEPAKAT, 2022)



Koefisien Gini:

0,277

(Badan Pusat Statistik, 2024)



**Indeks Pembangunan
Manusia:**

72,88

(Badan Pusat Statistik, 2023)



**Angka Partisipasi Murni (APM)
Pendidikan:**

SD/MI : 94,73

SMP/MTs : 80,53

SMA/SMK/MA : 66,70

(Badan Pusat Statistik, 2023)



Jumlah Fasilitas Kesehatan:

16 Rumah Sakit

58 Pusat Kesehatan Masyarakat

52 Klinik Pratama

766 Posyandu

(Badan Pusat Statistik, 2023)

Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Kaltara mendapat manfaat besar dari sumber daya alamnya yang melimpah, khususnya sektor pertambangan, yang berperan besar dalam PDB (Pendapatan Domestik Bruto) provinsi. Ada peluang besar untuk mendiversifikasi peluang kerja, terutama bagi pekerja berketerampilan rendah dan menengah, dengan memperluas lebih dari sekadar kegiatan berbasis sumber daya. Upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan akses keuangan sedang dilakukan, untuk membuka seluruh potensi ekonomi provinsi ini. Terdapat komitmen kuat pemerintah untuk memajukan pembangunan sosial, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, untuk memastikan bahwa semua penduduk mendapatkan manfaat dari peningkatan pemberian layanan dan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) provinsi.²



Pelayanan Dasar Inklusif di Kaltara

Pemerintah provinsi memiliki tugas memastikan pembentukan dan operasionalisasi tata kelola program SKALA di Kaltara. Pembentukan Komite Program Provinsi (*Provincial Program Committee* - PPC) melalui surat Keputusan Gubernur No 188.44/K.537/2023 tentang pembentukan komite sekretariat program SKALA memungkinkan terjadinya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah. SKALA juga menyelaraskan Rencana Kerja Tahunannya dengan dokumen dan inisiatif perencanaan daerah untuk mendorong pemahaman bersama dan kolaborasi di antara mitra pemerintah yang didukung SKALA. Sinergi ini membantu meningkatkan efektivitas tata kelola daerah.

2. Provinsi Kalimantan Utara Dalam angka, Badan Pusat Statistik 2023 dan SEPAKAT-Regsosek Bappenas RI.



Mempromosikan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Untuk pertama kalinya di kawasan ini, pemerintah Kaltara memprakarsai penyertaan isu GEDSI dalam perencanaan dan pemberian layanan dasar dengan memfasilitasi konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil (CSO). Kolaborasi ini membantu terbentuknya Forum Komunikasi Disabilitas, Kelompok Rentan, Perempuan, dan Anak yang terdiri dari 12 OMS3 dan lima organisasi perangkat daerah. Jaringan ini menjadi inisiator dan mewakili kelompok GEDSI dalam menyampaikan aspirasi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Inklusif yang pertama di Kaltara ("Mentari Kaltara") dan memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dan Penyandang Disabilitas. Upaya ini menandai langkah signifikan menuju pemerintahan inklusif di Kaltara, dengan memastikan bahwa kebutuhan dan suara kelompok marginal diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan daerah.



Menggunakan Data dan Analitik untuk Perencanaan dan Penyediaan Layanan yang Lebih Baik

Melalui dukungan SKALA, pemerintah menginisiasi desain ulang platform atau aplikasi berbagi pakai data Kaltara Satu Data SIDARA CANTIK (Sistem Informasi Data Statistik Sektoral Cepat, Akuntabel, Informatif, dan Konkrit). Daftar data prioritas dan metadata dikembangkan, dan rencana aksi Satu Data disetujui untuk dilaksanakan melalui dukungan keuangan pada anggaran tahun 2024. Selain itu, Pelatih Utama dilatih untuk memanfaatkan data REGSOSEK melalui sistem SEPAKAT, yang memungkinkan 13 Organisasi Perangkat Daerah mendapatkan hak akses ke register sosio-ekonomi tersebut. Pemerintah Kaltara menggunakan data ini untuk perencanaan di 20 organisasi perangkat daerah, dan menjadi input dalam dokumen-dokumen penting seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJPD dan RPJMD), rencana kerja (Renja) daerah, dan Rencana Aksi Daerah (RAD).



Meningkatkan Kapasitas Fiskal

Pemerintah Provinsi Kaltara telah melakukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, termasuk nomenklatur program yang berfokus pada kemiskinan dan layanan dasar, dalam Perubahan Renstra 2021-2026 untuk 35 organisasi perangkat daerah provinsi, dengan dukungan SKALA. Pemerintah Kaltara mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 25 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan pemetaan pendapatan daerah yang dilakukan bekerja sama dengan SKALA dan lembaga-lembaga daerah⁴. Pemerintah juga mengidentifikasi permasalahan utama dalam rancangan pedoman pelaksanaan PDRD berdasarkan pemetaan ini. Sebuah studi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diselesaikan dengan masukan dari 12 organisasi perangkat daerah dan dua universitas lokal⁵. Pemerintah Kaltara menyetujui dan menyerahkan laporan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024 dengan penentuan kegiatan dan sub-kegiatan terkait standar pelayanan minimal (SPM) menggunakan Data REGSOSEK, sehingga menghasilkan peningkatan belanja bidang pendidikan sebesar 52%. Selain itu, SKALA mendukung peningkatan pemahaman dan kapasitas pemerintah dalam mengelola Hibah Khusus DAU dan mendorong penggunaan data REGSOSEK untuk program-program yang ditargetkan. Kemajuan ini mencerminkan kepemimpinan pemerintah Kaltara dalam menyelaraskan kebijakan dan meningkatkan pengelolaan pendapatan untuk meningkatkan efektivitas pemberian layanan. Lebih lanjut, SKALA juga mendukung tagging sasaran dan identifikasi permasalahan untuk pencapaian SPM di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum (PU) dengan memanfaatkan Hibah Khusus DAU. Data-data dari REGSOSEK digunakan untuk memastikan keakuratan dalam pengelolaan dan implementasinya, yang mana pengolahan data REGSOSEK ini dilaksanakan oleh Operator Regsosek yang telah dilatih oleh SKALA.

3. Forum Anak Daerah, Puspa Benuanta, Yayasan Insan cita assyaili, PW Salimah Kaltara, Yayasan Faqih Hasan Centre, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Fatayat NU (HWDI), Hangout Community, Yayasan Mulya Bulungan (YMB), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), PW. Muslimat NU, Gerkatina Kaltara, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA Penca).
4. UPTD Bappenda, Bappeda, Universitas Borneo Tarakan, dan Politeknik Nunukan.
5. Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Kalimantan Utara



Peningkatan Kualitas Belanja: Perencanaan Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Kaltara telah mengambil langkah signifikan untuk meningkatkan kualitas belanjanya melalui perencanaan strategis untuk memenuhi standar pelayanan minimum (SPM). Dengan menggunakan data dan analisis REGSOSEK, pemerintah telah secara efektif mengintegrasikan data multi-sektor untuk lebih memahami dan merencanakan kebutuhan layanan dasar masyarakatnya. Kemajuan juga tercermin dalam peningkatan anggaran operasional sekretariat SPM dan desain ulang SIDARA CANTIK. Dukungan teknis

bagi pejabat di tingkat provinsi dan kabupaten dalam menentukan sasaran masukan, pemantauan, dan evaluasi di enam sektor SPM telah membekali mereka untuk merencanakan dan mengawasi pemberian layanan inklusif dengan lebih baik. Selain itu, upaya pemerintah Kaltara untuk mengadvokasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan merancang peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi telah berkontribusi pada pendekatan belanja publik di Kaltara yang lebih berkelanjutan dan terfokus.

Rencana Program Kerja SKALA periode Tahun 2024-2025:

TEMA	AREA FOKUS RENCANA KERJA 2024-2025
Penguatan Partisipasi , Presentasi dan Pengaruh Kelompok Rentan (GEDSI)	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan penguatan partisipasi, representasi, dan pengaruh kelompok rentan dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan
Penguatan Penyediaan dan Pemanfaatan Data (D&A)	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan penguatan kebijakan dan kelembagaan satu data daerah• Dukungan penguatan sistem informasi tingkat desa• Dukungan penguatan sistem dan integrasi antar sistem pengelolaan data• Dukungan penguatan analisis, pemutakhiran, dan pemanfaatan data
Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah (PFM)	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan penguatan pendapatan daerah• Dukungan penguatan pengelolaan transfer ke daerah
Peningkatan Kualitas Belanja Daerah (SPM)	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan penguatan pengelolaan implementasi penerapan SPM• Dukungan penguatan perencanaan dan Penganggaran daerah untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif
Tata Kelola Pemerintahan (PPC)	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan tata kelola program SKALA di Provinsi Kalimantan Utara